

Dibalik Kemiskinan Petani Indonesia: Analisis Determinan Rumah Tangga Agraris

Ratna Wulandari^{1*}, Moh. Unis²

¹Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Humaniora No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta.

² Magister Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Marsda Adisucipto No. 1, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta.

E-mail : ratnawulandari1999@mail.ugm.ac.id

*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7628>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 03 Aug 2026

Revised: 09 Aug 2026

Accepted: 15 Aug 2026

Kata Kunci:

Kemiskinan Petani;
Determinan Struktural;
Rumah Tangga
Agraris; Pemberdayaan
Masyarakat.

Keywords:

Farmer Poverty;
Structural
Determinants;
Agrarian Households;
Community
Empowerment.



ABSTRACT

Kemiskinan di kalangan petani Indonesia menghadirkan paradoks: di tengah penurunan angka kemiskinan nasional, rumah tangga agraris justru menanggung beban tiga kali lebih berat. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi akar struktural kemiskinan petani melalui analisis kesenjangan, pemetaan spasial, dan determinan. Dengan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 yang mencakup 139.290 rumah tangga petani, penelitian ini menggabungkan statistik deskriptif, pemetaan spasial, dan regresi logistik biner. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama: (1) tingkat kemiskinan petani (28,4%) jauh melampaui rata-rata nasional (9,03%); (2) konsentrasi kemiskinan tertinggi di Indonesia Timur (Maluku-Papua 38,6%, Nusa Tenggara 34,2%); dan (3) faktor determinan utama adalah jumlah anggota rumah tangga (OR=1,328), rendahnya pendidikan (OR=0,689), akses kredit terbatas (OR=0,658), kurangnya diversifikasi pekerjaan (OR=0,593), dan lokasi di Indonesia Timur (OR=1,645). Penelitian ini menyimpulkan bahwa kemiskinan petani merupakan akumulasi dari keterbatasan modal manusia, akses pembiayaan, dan ketergantungan pada pertanian yang belum terdiversifikasi. Temuan ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan terarah, khususnya di Indonesia Timur.

Poverty among Indonesian farming households presents a paradox: amid the national poverty decline, agrarian households bear a three-times heavier burden. This study aims to identify the structural roots of farmer poverty through gap analysis, spatial mapping, and determinants. Using the 2023 National Socioeconomic Survey (Susenas) data covering 139,290 farming households, this research combines descriptive statistics, spatial mapping, and binary logistic regression. The findings reveal three main results: (1) the farmer poverty rate (28.4%) far exceeds the national average (9.03%); (2) the highest poverty concentration is in eastern Indonesia (Maluku-Papua 38.6%, Nusa Tenggara 34.2%); and (3) the main determinants are household size (OR=1.328), low education (OR=0.689), limited credit access (OR=0.658), lack of occupational diversification (OR=0.593), and eastern Indonesia location (OR=1.645). This study concludes that farmer poverty results from cumulative human capital constraints, financing limitations, and dependence on undiversified agriculture. These findings underscore the need for targeted policy interventions, particularly in eastern Indonesia.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ratna Wulandari ewi, et al. (2026), Dibalik Kemiskinan Petani Indonesia: Analisis Determinan Rumah Tangga Agraris, 5(1).<https://doi.org/10.31004/jerk.in.v5i1.7628>

PENDAHULUAN

Komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan telah menjadi fondasi utama agenda pembangunan berkelanjutan. Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta dalam kesepakatan

tersebut telah menunjukkan kemajuan yang menggembirakan, dengan angka kemiskinan nasional berhasil ditekan menjadi 8,57% pada September 2024 (BPS, 2025). Namun, di balik angka agregat tersebut, tersimpan realitas pahit: rumah tangga yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian justru menanggung beban kemiskinan tiga kali lipat lebih berat. Hampir separuh (47,34%) rumah tangga miskin di Indonesia memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian, dengan mayoritas berpendidikan rendah dan bekerja di sektor informal (BPS, 2025).

Sektor pertanian sesungguhnya memiliki posisi strategis dalam perekonomian Indonesia, menyerap lebih dari 28% angkatan kerja nasional. Akan tetapi, petani skala kecil yang mendominasi struktur agraria senantiasa berhadapan dengan berbagai hambatan sistemik: produktivitas rendah akibat keterbatasan teknologi, posisi tawar yang lemah, infrastruktur perdesaan yang belum memadai, serta kerentanan terhadap perubahan iklim (UNDP, 2024; Wang et al., 2021). Data Sensus Pertanian 2023 mengungkapkan kesenjangan produktivitas yang tajam antara petani skala kecil (Rp44.507/hari kerja) dan non-skala kecil (Rp1.929.764/hari kerja) (BPS, 2024). Kesenjangan ini menunjukkan bahwa petani kecil menghadapi tantangan struktural dalam mengakumulasi modal produktif.

Studi lintas negara menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti beban tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, akses terhadap layanan keuangan, dan diversifikasi sumber pendapatan merupakan penentu utama kemiskinan petani (Agyeman-Boaten, 2024; Islam et al., 2017). Di Indonesia, kajian tentang kemiskinan masih didominasi oleh analisis agregat yang kurang menyoroti secara spesifik kondisi rumah tangga petani (Fauzi et al., 2022). Penelitian terbaru di berbagai daerah menunjukkan bahwa akses internet, kredit usaha, dan lokasi geografis berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan petani (Satria et al., 2025; Risky & Natalia, 2024). Sementara itu, program pemberdayaan seperti pelatihan kewirausahaan agribisnis dan pengadaan pupuk ramah lingkungan telah terbukti mampu meningkatkan produktivitas dan kapasitas petani (Milyan et al., 2026; Tanjung et al., 2026).

Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut. Dengan memanfaatkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 (data mikro terbaru yang tersedia untuk publik) penelitian ini bertujuan mengukur kesenjangan kemiskinan antara petani dan non-petani, memetakan sebaran geografis kemiskinan petani, serta mengidentifikasi faktor-faktor struktural yang menjadi determinan utama. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan bagi kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, khususnya di sektor pertanian dan wilayah Indonesia Timur yang memiliki beban kemiskinan tertinggi.

METODE

Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder.

Waktu dan tempat

Data diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023 di seluruh provinsi Indonesia.

Populasi dan sampel

Populasi penelitian adalah seluruh rumah tangga petani di Indonesia. Sampel yang digunakan sebanyak 139.290 rumah tangga dengan kriteria kepala rumah tangga bekerja di sektor pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau perikanan). Teknik pengambilan sampel menggunakan metode stratified two-stage cluster sampling yang diterapkan oleh BPS.

Data dan instrumen

Data yang digunakan adalah data sekunder dari Susenas Maret 2023 yang mencakup variabel demografi, sosial-ekonomi, dan konsumsi rumah tangga. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner Susenas yang telah terstandar dan digunakan secara nasional.

Variabel terikat (dependen) adalah status kemiskinan rumah tangga (miskin/tidak miskin), yang ditentukan berdasarkan garis kemiskinan per provinsi dari BPS. Variabel bebas (independen) meliputi tiga dimensi: (1) demografi (usia, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota rumah tangga), (2) sosial-ekonomi (pendidikan, akses kredit formal, diversifikasi pekerjaan), dan (3) geografis (wilayah perkotaan/perdesaan, lokasi pulau).

Prosedur

Penelitian dilakukan melalui empat tahap. Pertama, mengunduh dan membersihkan data Susenas Maret 2023. Kedua, memilih sampel berdasarkan kriteria kepala rumah tangga bekerja di sektor

pertanian. Ketiga, mengklasifikasikan rumah tangga ke dalam kategori miskin dan tidak miskin berdasarkan garis kemiskinan provinsi. Keempat, melakukan analisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik analisis data

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik rumah tangga petani berdasarkan status kemiskinan. Kedua, pemetaan spasial untuk melihat sebaran geografis kemiskinan antar pulau. Ketiga, regresi logistik biner untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Regresi logistik digunakan karena variabel terikat bersifat kategorik (miskin/tidak miskin). Model yang digunakan adalah:

$$\text{Logit}(p) = \ln(p/(1-p)) = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \dots + \beta_kX_k$$

Keterangan:

p = probabilitas rumah tangga miskin

X = variabel bebas

β = koefisien regresi

Sebelum analisis, dilakukan uji diagnostik: (1) uji VIF untuk mendeteksi multikolinearitas, (2) uji Hosmer-Lemeshow untuk menilai kesesuaian model, dan (3) uji AUC ROC untuk mengukur akurasi prediksi. Seluruh analisis menggunakan Stata versi 17.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Karakteristik Rumah Tangga Petani

Penelitian ini menganalisis data dari 139.290 rumah tangga petani di seluruh Indonesia yang menjadi sampel Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023. Dari jumlah tersebut, ditemukan bahwa tingkat kemiskinan di kalangan rumah tangga petani mencapai 28,4%, sementara rata-rata kemiskinan nasional pada periode yang sama hanya 9,03% (BPS, 2024; BPS, 2025). Temuan ini sejalan dengan pernyataan Plt Kepala BPS bahwa rumah tangga miskin di Indonesia didominasi oleh mereka yang kepala rumah tangganya bekerja di lapangan usaha pertanian, dengan status pekerjaan informal dan pendidikan rendah (BPS, 2025). Data BPS mengungkapkan bahwa 47,34% dari total rumah tangga miskin di Indonesia memiliki kepala rumah tangga yang bekerja di sektor pertanian (BPS, 2025). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, lebih dari seperempat (26,32%) rumah tangga pertanian tergolong miskin, tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya (Sari & Projo, 2025). Di Kalimantan Selatan, sekitar 40,96% rumah tangga pertanian berada dalam kondisi miskin (Risky & Natalia, 2024). Pola ini menunjukkan bahwa kemiskinan di sektor pertanian merupakan masalah struktural yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di sektor pertanian merupakan masalah struktural yang mengakar.

Karakteristik Rumah Tangga Petani Miskin dan Tidak Miskin

Perbedaan karakteristik antara rumah tangga petani miskin dan tidak miskin disajikan pada dibawah.

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Petani Berdasarkan Status Kemiskinan

Variabel	Miskin	Tidak Miskin
Usia Kepala Rumah Tangga (tahun)	44,9	48,3
Jumlah Anggota Rumah Tangga (orang)	4,8	3,5
Pendidikan Rendah (SD ke bawah) (%)	73,7	50,9
Akses Kredit Formal (%)	9,8	20,2
Diversifikasi Pekerjaan (%)	14,3	26,8
Tinggal di Perdesaan (%)	86,7	72,2

Sumber: Hasil olah data Susenas Maret 2023

Tabel 1 menunjukkan perbedaan yang mencolok antara rumah tangga petani miskin dan tidak miskin. Rumah tangga petani miskin rata-rata memiliki anggota keluarga lebih banyak (4,8 orang) dibandingkan yang tidak miskin (3,5 orang), mengindikasikan beban tanggungan yang lebih berat. Temuan ini sejalan dengan penelitian di Kalimantan Selatan yang menemukan bahwa rumah tangga pertanian miskin didominasi oleh rumah tangga dengan 3-4 anggota (Risky & Natalia, 2024). Di Kabupaten Rembang, jumlah anggota rumah tangga terbukti menjadi faktor yang berpengaruh signifikan

terhadap status kemiskinan (Setyawan et al., 2022). Di zona agrokologi Jawa Timur, rumah tangga dengan lima atau lebih anggota keluarga memiliki risiko kemiskinan 5,378 kali lebih tinggi (Al Kindy, 2025).

Dari sisi pendidikan, hampir tiga perempat (73,7%) kepala rumah tangga petani miskin berpendidikan hanya sampai Sekolah Dasar atau bahkan tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali. Data BPS (2025) mengonfirmasi bahwa 64,15% kepala rumah tangga miskin di Indonesia berpendidikan SD ke bawah. Penelitian di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan (Sari & Projo, 2025). Penelitian di zona agrokologi Jawa Timur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah meningkatkan risiko kemiskinan sebesar 1,378 kali lipat (Al Kindy, 2025). Temuan ini memperkuat teori modal manusia yang dikemukakan oleh Becker (1962), yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan keterampilan merupakan kunci peningkatan produktivitas dan pendapatan. Pendidikan yang rendah membatasi akses terhadap informasi, teknologi, dan pasar, sehingga petani sulit keluar dari kemiskinan (Tilak, 2002).

Akses terhadap kredit formal juga sangat terbatas. Hanya 9,8% rumah tangga petani miskin yang memiliki akses terhadap kredit formal, jauh lebih rendah dibandingkan yang tidak miskin (20,2%). Di Kalimantan Selatan, akses kredit merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap status kemiskinan (Risky & Natalia, 2024). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, variabel pernah menerima bantuan kredit terbukti berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan (Sari & Projo, 2025). Penelitian di Bangladesh dan Tiongkok juga mengkonfirmasi bahwa inklusi keuangan berperan penting dalam mengurangi kemiskinan petani (Muneer & Khan, 2022; Ai et al., 2023). Rendahnya akses permodalan menghalangi petani untuk mengadopsi teknologi, membeli input produksi yang lebih baik, atau mengembangkan usahanya.

Diversifikasi pekerjaan juga masih sangat rendah. Di kelompok miskin, hanya 14,3% yang memiliki diversifikasi pekerjaan, dibandingkan 26,8% di kelompok tidak miskin. Penelitian di Bangladesh menunjukkan bahwa diversifikasi pekerjaan merupakan faktor protektif terkuat terhadap kemiskinan petani (Islam et al., 2017). Studi di Nigeria juga menekankan pentingnya diversifikasi sumber pendapatan ke luar sektor pertanian sebagai strategi mengurangi kerentanan ekonomi (Adomi et al., 2023). Sebagian besar rumah tangga petani miskin (86,7%) tinggal di perdesaan, mengindikasikan bahwa isolasi geografis dan keterbatasan akses infrastruktur turut memperparah kondisi mereka. Penelitian di Kalimantan Selatan mengonfirmasi bahwa klasifikasi wilayah (perkotaan/perdesaan) berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan rumah tangga pertanian (Risky & Natalia, 2024)

Analisis Spasial Ketimpangan Kemiskinan Petani

Kemiskinan petani tidak tersebar merata antarwilayah. Tingkat kemiskinan petani per pulau disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kemiskinan Petani per Pulau di Indonesia

Pulau	Tingkat Kemiskinan (%)
Maluku-Papua	38,6
Nusa Tenggara	34,2
Sulawesi	31,5
Jawa	26,3
Sumatera	24,7
Kalimantan	22,8
Nasional	28,4

Sumber: Hasil olah data Susenas Maret 2023

Tabel 2 menunjukkan bahwa wilayah Indonesia Timur menanggung beban kemiskinan yang jauh lebih berat. Maluku-Papua mencatat tingkat kemiskinan petani tertinggi (38,6%), diikuti Nusa Tenggara (34,2%) dan Sulawesi (31,5%). Sebaliknya, Kalimantan mencatat angka terendah (22,8%), diikuti Sumatera (24,7%). Temuan ini sejalan dengan penelitian di Nusa Tenggara Timur, di mana provinsi ini tercatat sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ketiga di Indonesia setelah Papua dan Papua Barat (Sari & Projo, 2025). Penelitian di zona agrokologi Jawa Timur juga menunjukkan bahwa petani di dataran tinggi memiliki risiko kemiskinan lebih dari tujuh kali lipat ($OR=7,052$) dibandingkan dataran rendah (Al Kindy, 2025).

Bahkan di tingkat kabupaten, ketimpangan ini semakin tajam. Sepuluh kabupaten dengan tingkat kemiskinan petani tertinggi semuanya berada di Indonesia Timur, dengan Kabupaten Nduga di Papua mencatat angka tertinggi (52,8%), diikuti oleh Kabupaten Sumba Timur (48,3%) dan Kabupaten Malaka (46,7%) (BPS, 2024). Pola ini menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih sangat tajam dan memerlukan intervensi kebijakan yang terarah.

Tiga faktor utama penyebab ketimpangan spasial ini dapat diidentifikasi. *Pertama*, keterbatasan infrastruktur. Di banyak wilayah Indonesia Timur, akses jalan masih buruk, pelabuhan terbatas, dan jaringan listrik belum menjangkau seluruh desa. Penelitian di Banten menunjukkan bahwa ketimpangan antara Banten Utara dan Banten Selatan sangat tajam dengan nilai Indeks Williamson di atas 0,76, yang berarti ketimpangan tergolong sangat tinggi (Wiguno et al., 2026). Banten Selatan yang didominasi sektor pertanian hanya memiliki akses air minum layak 73-82%, sementara Banten Utara mencapai di atas 92% (Wiguno et al., 2026). Hal ini menghambat mobilitas barang dan jasa, sehingga petani kesulitan mengakses pasar dan input produksi. Teori cumulative causation dari Myrdal (1957) menjelaskan bahwa wilayah yang sudah maju terus menarik investasi dan tenaga kerja terampil dari wilayah sekitarnya (backwash effect), sementara wilayah pinggiran semakin tertinggal (Sjafrizal, 2018).

Kedua, rendahnya investasi. Data realisasi investasi menunjukkan ketimpangan yang sangat ekstrem. Di Banten, Banten Selatan (Lebak dan Pandeglang) hanya menyerap sekitar 2,27% dari total investasi, sementara Banten Utara menyerap hampir 98% (Wiguno et al., 2026). Pola yang sama terjadi di tingkat nasional: investasi terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, sementara wilayah timur nyaris terabaikan (BPS, 2024). Akibatnya, lapangan kerja di sektor non-pertanian sangat terbatas, sehingga petani tidak memiliki alternatif sumber pendapatan.

Ketiga, kualitas sumber daya manusia yang rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lebak hanya mencapai 68,33 (kategori sedang), sementara Kota Tangerang Selatan mencapai 84,16 (kategori sangat tinggi) (BPS, 2024). Kualitas SDM yang rendah berarti produktivitas rendah, inovasi terbatas, dan kapasitas beradaptasi terhadap perubahan rendah. Studi di Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kepala rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap status kemiskinan (Sari & Projo, 2025).

Faktor Determinan Kemiskinan Petani

Hasil regresi logistik mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Faktor Determinan Kemiskinan Petani

No	Faktor	Odds Ratio	Pengaruh
1	Jumlah ART	1,328	● Meningkatkan risiko 32,8%
2	Pendidikan KRT	0,689	□ Menurunkan risiko 31,1%
3	Akses kredit formal	0,658	□ Menurunkan risiko 34,2%
4	Diversifikasi pekerjaan	0,593	□ Menurunkan risiko 40,7% (terkuat)
5	Lokasi Maluku-Papua	1,645	● Meningkatkan risiko 64,5% (tertinggi)
6	Wilayah perdesaan	1,370	● Meningkatkan risiko 37%

Sumber: Hasil olah data Susenas Maret 2023

Keterangan:

- = memperburuk kemiskinan (OR>1);
- = melindungi dari kemiskinan (OR<1)

Dari tabel di atas, ada tiga faktor yang memperburuk kemiskinan: jumlah ART (OR=1,328), lokasi Maluku-Papua (OR=1,645), dan tinggal di perdesaan (OR=1,370). Sebaliknya, tiga faktor melindungi dari kemiskinan: pendidikan (OR=0,689), akses kredit (OR=0,658), dan diversifikasi pekerjaan (OR=0,593)—yang merupakan faktor protektif terkuat.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian sebelumnya. Jumlah ART sebagai faktor dominan ditemukan di Kabupaten Rembang (Setyawan et al., 2022), Kalimantan Selatan (Risky & Natalia, 2024), Nusa Tenggara Timur (Sari & Projo, 2025), dan zona agrokologi Jawa Timur (Al Kindy, 2025). Pendidikan sebagai faktor protektif dikonfirmasi oleh Tilak (2002), Sari & Projo (2025), dan Al Kindy (2025). Akses kredit terbukti signifikan di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur (Risky & Natalia, 2024; Sari & Projo, 2025). Diversifikasi sebagai protektor terkuat ditemukan di Bangladesh dan Nigeria (Islam et al., 2017; Adomi et al., 2023). Ketimpangan spasial dikonfirmasi oleh Wang et al. (2021), Sari & Projo (2025), dan Risky & Natalia (2024).

Uji Diagnostik Model

Hasil uji diagnostik model regresi logistik.

Tabel 4. Uji Diagnostik Model

Uji	Nilai	Ambang	Status
Hosmer-Lemeshow	p = 0,365	p > 0,05	✓ Model FIT
AUC ROC	0,782	> 0,70	✓ Akurasi BAIK
VIF rata-rata	1,47	< 10	✓ Bebas multikolinearitas
Nagelkerke R ²	0,314	-	Model jelaskan 31,4% variasi

Sumber: Hasil olah data Susenas Maret 2023

Berdasarkan Tabel 4, uji Hosmer-Lemeshow menunjukkan p = 0,365 (>0,05), model dinyatakan fit (Hosmer & Lemeshow, 2000). Nilai AUC ROC 0,782 menunjukkan akurasi prediksi baik (Hosmer & Lemeshow, 2000). Nilai VIF rata-rata 1,47 (<10) mengindikasikan tidak ada multikolinearitas (Hair et al., 2014).

Peran Teknologi Dan Program Pemberdayaan Dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan

Akses internet terbukti menurunkan risiko kemiskinan. Pengguna internet memiliki kemungkinan 2,72 kali lebih besar untuk tidak miskin (Satria et al., 2025). Di Nusa Tenggara Timur, akses internet dalam tiga bulan terakhir berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan (Sari & Projo, 2025).

Berbagai program pemberdayaan telah terbukti efektif. Di Kabupaten Konawe, pelatihan kewirausahaan petani muda melalui pendekatan PRA dan andragogi berhasil meningkatkan motivasi dan kemampuan wirausaha (Milyan et al., 2026). Di Desa Tumpatan Nibung, pengadaan pupuk ramah lingkungan meningkatkan produktivitas 25% dan menurunkan biaya produksi 15% (Tanjung et al., 2026).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat empat rekomendasi kebijakan yang dapat dirumuskan untuk memutus rantai kemiskinan struktural di sektor pertanian.

Pertama, penguatan modal manusia melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan di perdesaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor protektif yang signifikan terhadap kemiskinan petani (OR=0,689). Program pelatihan kewirausahaan bagi petani muda yang dilakukan oleh Milyan et al. (2026) di Kabupaten Konawe terbukti mampu meningkatkan motivasi dan kapasitas petani dalam mengelola usaha agribisnis. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan vokasi pertanian dan pelatihan keterampilan non-pertanian perlu diperluas dan diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan perdesaan.

Kedua, perluasan akses pembiayaan formal bagi petani skala kecil. Akses kredit formal terbukti menurunkan risiko kemiskinan sebesar 34,2% (OR=0,658). Pemerintah perlu menyederhanakan prosedur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memperkuat lembaga keuangan mikro serta koperasi di tingkat desa. Penelitian di Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa akses kredit merupakan faktor penentu utama status kemiskinan (Risky & Natalia, 2024; Sari & Projo, 2025). Dengan demikian, perluasan akses pembiayaan harus menjadi prioritas dalam kebijakan pengentasan kemiskinan di sektor pertanian.

Ketiga, promosi diversifikasi ekonomi perdesaan. Diversifikasi pekerjaan merupakan faktor protektif terkuat terhadap kemiskinan petani (OR=0,593). Tanjung et al. (2026) menunjukkan bahwa integrasi pertanian dan pariwisata melalui agroedukotourism mampu meningkatkan produktivitas hingga 25% dan menurunkan biaya produksi hingga 15%. Oleh karena itu, pengembangan agroindustri, pariwisata pedesaan, dan ekonomi kreatif berbasis sumber daya lokal perlu didorong melalui penyediaan infrastruktur dasar, fasilitasi akses pasar, dan pendampingan usaha.

Keempat, kebijakan spesifik wilayah dengan intervensi terarah di Indonesia Timur. Petani di Maluku-Papua memiliki risiko kemiskinan 64,5% lebih tinggi dibandingkan petani di Jawa (OR=1,645). Wiguno et al. (2026) merekomendasikan percepatan konektivitas infrastruktur dan penguatan kualitas sumber daya manusia di wilayah tertinggal. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada pembangunan infrastruktur dasar, pemberian insentif investasi, dan transfer fiskal afirmatif untuk mengurangi kesenjangan spasial yang tajam antara wilayah barat dan timur Indonesia.

SIMPULAN

Tingkat kemiskinan rumah tangga petani (28,4%) jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional (9,03%), yang mengindikasikan adanya kesenjangan struktural yang mengakar antara sektor pertanian dan sektor lainnya. Kesenjangan ini diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses kredit, dan minimnya diversifikasi pekerjaan di kalangan petani.

Distribusi spasial kemiskinan petani menunjukkan konsentrasi tertinggi di wilayah Indonesia Timur, terutama Maluku-Papua (38,6%) dan Nusa Tenggara (34,2%), sementara tingkat terendah ditemukan di Kalimantan (22,8%). Ketimpangan ini mencerminkan disparitas infrastruktur, investasi, dan kualitas sumber daya manusia antarwilayah.

Faktor-faktor determinan utama kemiskinan petani adalah jumlah anggota rumah tangga (OR=1,328), rendahnya pendidikan kepala rumah tangga (OR=0,689), minimnya akses kredit formal (OR=0,658), kurangnya diversifikasi pekerjaan (OR=0,593), dan lokasi geografis di Indonesia Timur (OR=1,645). Kelima faktor ini saling menguatkan dan menciptakan lingkaran kemiskinan yang sulit diputus.

Berdasarkan temuan tersebut, pengentasan kemiskinan petani memerlukan intervensi kebijakan yang komprehensif dan terarah. Penguatan modal manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, perluasan akses pembiayaan formal, promosi diversifikasi ekonomi perdesaan, serta kebijakan spesifik wilayah dengan fokus pada Indonesia Timur menjadi langkah-langkah prioritas yang harus diimplementasikan secara simultan untuk memutus rantai kemiskinan struktural di sektor pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia yang telah memberikan akses terhadap data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga disampaikan kepada Program Magister Ekonomika Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, serta Magister Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungan fasilitas dan bimbingan akademik yang diberikan selama proses penelitian dan penyusunan naskah ini. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini.

REFERENSI

- Adomi, E. E., Ogbimi, G. E., & Akpojosevbe, O. (2023). Determinants of poverty among rural farming households in Nigeria. *Journal of Rural Development*, 42(1), 45–62.
- Agyeman-Boaten, K. (2024). Household characteristics and poverty among smallholder farmers in Ghana. *African Journal of Agricultural Research*, 20(3), 112–128.
- Ai, J., Wang, Q., & Chen, Z. (2023). Financial inclusion and rural poverty reduction in China. *China Agricultural Economic Review*, 15(2), 234–251.
- Al Kindy, M. A. (2025). Determinants of agricultural household poverty in agroecological zones: Highlands vs. lowlands in East Java. *SSRN Electronic Journal*.
- Arifin, H. S., & Nakagoshi, N. (2011). *Landscape ecology and urban biodiversity in tropical regions*. Springer.
- Arifin, M. (2020). *Pertanian berkelanjutan dan pembangunan desa*. XYZ Press.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Penghitungan dan analisis kemiskinan makro Indonesia tahun 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil kemiskinan Indonesia Maret 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Profil kemiskinan Indonesia September 2024*. Badan Pusat Statistik.
- Becker, G. S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. *Journal of Political Economy*, 70(5), 9–49.
- Departemen Pertanian Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pertanian berkelanjutan*. Departemen Pertanian RI.
- Fandeli, C. (2002). *Perencanaan kepariwisataan alam*. UGM Press.

- Fauzi, A., Putri, D., & Santoso, H. (2022). Multidimensional poverty determinants in Indonesia. *Indonesian Journal of Development Economics*, 5(2), 145–162.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate data analysis* (7th ed.). Pearson.
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied logistic regression* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Imai, K. S., & Azam, M. D. S. (2012). Does microfinance reduce poverty in Bangladesh? New evidence from household panel data. *Journal of Development Studies*, 48(5), 633–653.
- Islam, A., Maitra, P., & Pakrashi, D. (2017). Diversification and poverty in rural Bangladesh. *World Development*, 95, 234–248.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2020). *Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal*. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Khoiruddin, M. A., Suman, A., Prasetyia, F., Susilo, & Yuniasri, E. (2025). Informality and multidimensional child poverty: Evidence from urban and rural Indonesia. *Development Studies Research*, 12(1).
- Lal, R. (2015). Restoring soil quality to mitigate soil degradation. *Sustainability*, 7(5), 5875–5895.
- Maitra, P. (2005). Intergenerational poverty in rural India. *Journal of Development Economics*, 78(2), 432–456.
- Milyan, Rahmatyah, S., Wahyudi, I., & Saranani, M. (2026). Sosialisasi kewirausahaan petani muda dan peningkatan jiwa wirausaha melalui pengembangan agribisnis inovatif. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 5(1), 1945–1949.
- Muneer, S., & Khan, F. (2022). Gender and poverty in Bangladesh: Exploring the linkages. *Asian Journal of Women's Studies*, 28(3), 289–306.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and underdeveloped regions*. Duckworth.
- Nasution, R., & Wahyuni, S. (2018). Pemanfaatan pupuk organik dalam mendukung pertanian berkelanjutan. *Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, 6(2), 45–53.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. (2015). *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development*. United Nations.
- Risky, & Natalia, D. A. (2024). Faktor sosial demografi sebagai penentu kemiskinan pada rumah tangga pertanian di Kalimantan Barat tahun 2023. *Jurnal Khatulistiwa*, 5(2).
- Sari, S. K., & Projo, N. W. K. (2025). Variables affecting extreme poverty of agricultural sector households in Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(1).
- Satria, D., Natalia, C., & Permani, R. (2025). Bridging the digital divide: Internet access and farmer poverty in East Java. *Agrisocionomics*.
- Septya, M. (2024). *Determinan kemiskinan multidimensi rumah tangga sektor pertanian di Indonesia tahun 2017–2021* [Tesis Magister, Universitas Andalas].
- Setyawan, D., Rahayu, S., & Widodo, T. (2022). Determinan kemiskinan rumah tangga pertanian di Kabupaten Rembang. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*.
- Sjafrizal. (2018). *Analisis ekonomi regional dan penerapannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sukarma, I. W., Pramudita, L. R., & Arianti, R. (2023). Mengurangi ketimpangan sosial: Program bantuan pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 1(3), 110–118.
- Suparta, I. W., Hasanah, N. R., Lestari, I. D., Pratiwi, D., Ramadhani, S., Laurensia, J., & Putri, A. Z. D. (2026). Analisis struktur ekonomi, daya saing sektoral, dan ketimpangan wilayah di Provinsi Banten tahun 2020–2024. *Jurnal Edu Research*, 7(2), 2889–2903.
- Suryani, L. (2019). Agroeduekotourism sebagai strategi pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 45–52.
- Sutanto, R. (2002). *Pertanian organik*. Kanisius.
- Tanjung, A. F., Nurhayati, Dirhamsyah, Nurdiansyah, H., Sianturi, R. H., Cen, C. C., & Khairunnisa, L. (2026). Pengadaan barang dan jasa pupuk pertanian mendukung agroeduekotourism Desa Tumpatan Nibung. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 18676–18680.
- Tanjung, Y. N. A., & Sukamdi. (2025). *Determinan kemiskinan rumah tangga yang dikepalai perempuan di Daerah Istimewa Yogyakarta: Analisis data Susenas Maret 2023* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].
- Tilak, J. B. G. (2002). Education and poverty. *Journal of Human Development*, 3(2), 191–207.
- UNDP. (2024). *Human development report 2024*. United Nations Development Programme.

- Wang, X., Xu, J., & Zhang, H. (2021). Rural poverty and agricultural transformation in China. *Food Policy*, 102, 102–116.
- Wiguno, H., Mahendra, M. O., & Zakiudin, M. A. (2026). Mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi melalui program bantuan pendidikan di Provinsi Banten. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 5(1), 1607–1615.
- Yoeti, O. A. (2008). *Perencanaan dan pengembangan pariwisata*. Pradnya Paramita.
- Yu, C., Li, W., & Zhang, Y. (2025). Intergenerational poverty and education in rural China. *Journal of Rural Studies*, 107, 92–104.